BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/306 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN KAMPUNG LOKASI FOKUS INTERVENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DENGAN SKEMA PENDAMPINGAN DI KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2027

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang :

a. bahwa guna mendukung pelaksanaan program percepatan pencegahan dan penanggulangan penurunan Stunting di Kabupaten Jayapura, perlu menetapkan Kampung Lokasi Fokus pencegahan dan penanggulangan penurunan Stunting terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
11. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.Ppn/Hk/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
12. Surat Edaran Mendagri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kampung Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi dengan Skema Pendampingan di Kabupaten Jayapura Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2027.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

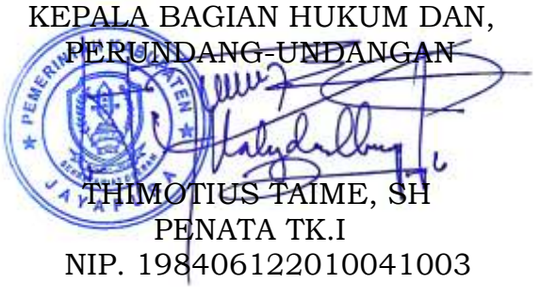
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 19 Juni 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/306 TAHUN 2026
TANGGAL 19 JUNI 2026

PENETAPAN KAMPUNG LOKASI FOKUS INTERVENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DENGAN SKEMA PENDAMPINGAN DI KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2027

NO	DISTRIK	KAMPUNG/KELURAHAN	JUMLAH BALITA	BALITA STUNTING	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	KAUREH	Soskotek	38	2	5.26
2	KAUREH	Lapua	954	54	5.66
3	KAUREH	Sebum	33	5	15.15
4	KAUREH	Umbron	0	0	-
5	KAUREH	Yadauw	58	4	6.90
6	AIRU	Pagai	11	1	9.09
7	AIRU	Hulu Atas	42	10	23.81
8	AIRU	Aurina	14	5	35.71
9	AIRU	Muara Nawa	17	6	35.29
10	AIRU	Kamikaru	12	2	16.67
11	AIRU	Naira	35	7	20.00
12	YAPSI	Tabbeyan	23	2	8.70
13	YAPSI	Ongan Jaya	107	0	-
14	YAPSI	Kwarja	17	2	11.76
15	YAPSI	Bumi Sahaja	118	5	4.24
16	YAPSI	Nawa Mulya	54	0	-
17	YAPSI	Nawa Mukti	37	4	10.81
18	YAPSI	Taqwa Bangun	24	3	12.50
19	YAPSI	Purnama Jati	19	0	-
20	YAPSI	Bundru	32	2	6.25
21	KEMTUK	Kwansu	45	2	4.44
22	KEMTUK	Nambom	30	5	16.67
23	KEMTUK	Mamei	57	5	8.77
24	KEMTUK	Mamda	46	0	-
25	KEMTUK	Manda Yawan	21	1	4.76
26	KEMTUK	Sama	26	1	3.85
27	KEMTUK	Soaib	44	3	6.82
28	KEMTUK	Sabeab Kecil	24	3	12.50
29	KEMTUK	Sekori	24	0	-
30	KEMTUK	Skoaim	23	0	-
31	KEMTUK	Aib	27	1	3.70
32	KEMTUK	Benggwin Progo	36	6	16.67
33	KEMTUK GRESI	Nembu Gresi	44	6	13.64
34	KEMTUK GRESI	Ibub	38	3	7.89
35	KEMTUK GRESI	Hatib	35	0	-
36	KEMTUK GRESI	Bring	45	8	17.78
37	KEMTUK GRESI	Pupehabu	38	2	5.26
38	KEMTUK GRESI	Domoikati	41	2	4.88
39	KEMTUK GRESI	Dementin	46	0	-
40	KEMTUK GRESI	Yanbra	50	3	6.00
41	KEMTUK GRESI	Braso	30	5	16.67
42	KEMTUK GRESI	Hyansip	64	6	9.38
43	KEMTUK GRESI	Jagrang	32	4	12.50

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
44	KEMTUK GRESI	Swentab	42	4	9.52
45	GRESI SELATAN	Klaisu	66	7	10.61
46	GRESI SELATAN	Bangai	22	2	9.09
47	GRESI SELATAN	Iwon	23	2	8.70
48	NIMBORAN	Yenggu Lama	23	1	4.35
49	NIMBORAN	Oyengsi	27	0	-
50	NIMBORAN	Singgriway	20	0	-
51	NIMBORAN	Tabri	54	1	1.85
52	NIMBORAN	Gemebs	31	0	-
53	NIMBORAN	Singgri	25	0	-
54	NIMBORAN	Meyu	24	1	4.17
55	NIMBORAN	Benyom	24	1	4.17
56	NIMBORAN	Kuipons	29	4	13.79
57	NIMBORAN	Imsar	22	1	4.55
58	NIMBORAN	Kaitemung	33	6	18.18
59	NIMBORAN	Kuwase	16	2	12.50
60	NIMBORAN	Pobaim	43	0	-
61	NIMBORAN	Yenggu Baru	12	0	-
62	NAMBLUONG	Sanggai	13	0	-
63	NAMBLUONG	Sarmai Atas	18	2	11.11
64	NAMBLUONG	Sarmai Bawah	21	2	9.52
65	NAMBLUONG	Yakasib	23	2	8.70
66	NAMBLUONG	Besum	27	2	7.41
67	NAMBLUONG	Karya Bumi	54	2	3.70
68	NAMBLUONG	Imestum	18	0	-
69	NAMBLUONG	Sumbe	25	1	4.00
70	NAMBLUONG	Hanggaiy Hamong	8	0	-
71	NIMBOKRANG	Benyom Jaya I	168	16	9.52
72	NIMBOKRANG	Benyom Jaya II	67	4	5.97
73	NIMBOKRANG	Nimbokrang	92	8	8.70
74	NIMBOKRANG	Nombukrang Sari	42	1	2.38
75	NIMBOKRANG	Berab	54	9	16.67
76	NIMBOKRANG	Wahab	26	5	19.23
77	NIMBOKRANG	Hamonggrang	23	5	21.74
78	NIMBOKRANG	Bunyom	29	3	10.34
79	NIMBOKRANG	Rhepang Muaf	37	1	2.70
80	UNURUM GUAY	Guryard	34	0	-
81	UNURUM GUAY	Santosa	52	3	5.77
82	UNURUM GUAY	Beneik	75	5	6.67
83	UNURUM GUAY	Ganusa	138	8	5.80
84	UNURUM GUAY	Sawa Suma	29	3	10.34
85	UNURUM GUAY	Nandaizi	11	1	9.09
86	DEMTA	Kamdera	53	3	5.66
87	DEMTA	Muaif	19	0	-
88	DEMTA	Ambora	81	4	4.94
89	DEMTA	Yougapsa	22	1	4.55
90	DEMTA	Demta	74	5	6.76
91	DEMTA	Yakore	70	4	5.71
92	DEMTA	Muris Kecil	41	3	7.32
93	YOKARI	Maruwai	57	4	7.02

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
94	YOKARI	Meukisi	62	3	4.84
95	YOKARI	Endokisi	41	2	4.88
96	YOKARI	Senamay	19	0	-
97	YOKARI	Buseryo	10	1	10.00
98	DEPAPRE	Kendate	63	8	12.70
99	DEPAPRE	Entiyebo	67	7	10.45
100	DEPAPRE	Waiya	76	10	13.16
101	DEPAPRE	Tablasupa	124	10	8.06
102	DEPAPRE	Yepase	52	0	-
103	DEPAPRE	Wambena	41	8	19.51
104	DEPAPRE	Yewena	37	4	10.81
105	DEPAPRE	Doromena	54	6	11.11
106	RAVENI RARA	Yongsu Sapari	23	3	13.04
107	RAVENI RARA	Yongsu Dosoyo	31	8	25.81
108	RAVENI RARA	Newa	31	4	12.90
109	RAVENI RARA	Nehibe	12	0	-
110	SENTANI BARAT	Sabron Sari	110	10	9.09
111	SENTANI BARAT	Sabro Yaru	92	3	3.26
112	SENTANI BARAT	Dosay	69	9	13.04
113	SENTANI BARAT	Waibron	100	10	10.00
114	SENTANI BARAT	Maribu	120	11	9.17
115	WAIBU	Donday	28	11	39.29
116	WAIBU	Kwadeware	55	1	1.82
117	WAIBU	Yakonde	48	4	8.33
118	WAIBU	Sosiri	74	20	27.03
119	WAIBU	Doyo Lama	104	7	6.73
120	WAIBU	Doyo Baru	697	39	5.60
121	WAIBU	Bambar	139	2	1.44
122	SENTANI	Hobong	59	0	-
123	SENTANI	Ilfele	154	9	5.84
124	SENTANI	Keheran	167	19	11.38
125	SENTANI	Dobonsolo	916	20	2.18
126	SENTANI	Yobeh	168	10	5.95
127	SENTANI	Ifar Besar	100	0	-
128	SENTANI	Sentani Kota	1902	91	4.78
129	SENTANI	Sereh	406	49	12.07
130	SENTANI	Hinekombe	1600	93	5.81
131	SENTANI	Yahim	164	0	-
132	EBUNGFAO	Bobrongko	55	2	3.64
133	EBUNGFAO	Simporo	28	2	7.14
134	EBUNGFAO	Khameyoka	64	0	-
135	EBUNGFAO	Atabar	37	3	8.11
136	EBUNGFAO	Ebungfa	44	0	-
137	SENTANI TIMUR	Puai	50	2	4.00
138	SENTANI TIMUR	Ayapo	131	8	6.11
139	SENTANI TIMUR	Asei Besar	51	1	1.96
140	SENTANI TIMUR	Asei Kecil	121	5	4.13

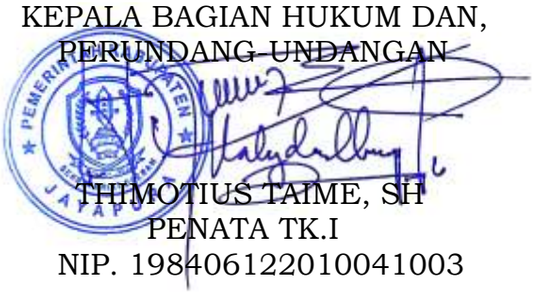
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
141	SENTANI TIMUR	Nolokla	249	22	8.84
142	SENTANI TIMUR	Nendali	215	4	1.86
143	SENTANI TIMUR	Yokiwa	20	0	-

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003